ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA APARATUR Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Oleh:

Nelly S. N. Laukamang*; Donny T. S. Junias**; Sulche I. Nafi***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memiliki kriteria yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang pula mengalami penurunan. Tahun 2011 tingkat efektivitas masih dalam kategori kurang efektif dan tidak efektif ditahun 2012, Tingkat efektivitas pada tahun 2012 menurun karena keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama. Tahun 2013 menunjukkan kategori cukup efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013 dikatakan Kurang efektif. Belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Penggunaan dana ini sudah memenuhi syarat yang efisien yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Belanja Aparatur, Efektivitas, Efisiensi, Dinas PPKAD Kabupaten Kupang

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and efficiency of spending at the Department PPKAD apparatus Kupang regency 2011-2013. The results showed that the level of effectiveness of expenditures apparatus PPKAD Kupang District Office have criteria that change, sometimes increased at times also decreased. In 2011 the level of effectiveness is still in the category of less effective and not effective in 2012, the effectiveness rate in 2012 decreased due to delays in the trial's first quarter budget setting. 2013 indicates a category quite effective. The overall level of spending effectiveness of personnel at the Department PPKAD Kupang district in 2011-2013 is said to be less effective. Shopping apparatus at the Department PPKAD Kupang district in 2011-2013 as a whole are processed efficiently. The use of these funds already qualified efficient use of funds is as minimal as possible to achieve maximum results.

Keywords : Expenditure Apparatus, effectiveness, efficiency, the agencies of PPKAD Kupang Regency

*) Nelly S. N. Laukamang; Student Alumni, Public Sector Accounting Studies, State Polytechnic of Kupang.

**) Donny T. S. Junias; Lecturer, Public Sector Accounting Studies, State Polytechnic of Kupang.

***) Sulche I. Nafi; Lecturer, Public Sector Accounting Studies, State Polytechnic of Kupang.

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini

menyebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kota maupun kabupaten diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Salah satu tujuan pemberian otonomi adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah dan demokratisasi yang mendorong lahirnya keputusan politik. Implikasinya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan sistem manajemen yang mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Anggaran Daerah (APBD) menjadi instrumen kebijakan yang utama

bagi pemerintah daerah dan menjadi poin penting dalam pengembangan efektivitas dan kapabilitas daerah serta sebagai alat dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran maupun membantu dalam pengambilan keputusan, mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Sistem anggaran juga merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja. Sistem ini terutama berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcome*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Anggarini dan Puranta, 2010). Mahsun (2013) menjelaskan bahwa efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sedangkan efisiensi dapat dimaknai sebagai pemanfaatan *input* minimal untuk mencapai hasil yang maksimal, dalam praktiknya berarti melaksanakan sesuatu dengan benar (Anggarini dan Puranto, 2010).

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah.

Belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran (Ulum, 2004). Belanja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan keterkaitan yang terjadi dan pengelolaan anggaran belanja secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output* atau *outcome* untuk menentukan efektivitas pelaksanaan anggaran atau belanja (Anggarini dan Puranta, 2010)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan keuangan merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan satu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Belanja aparatur dapat dikatakan efektif apabila realisasi diatas atau lebih tinggi

dari target yang ditetapkan, begitupula belanja aparatur dapat dikatakan efisien apabila realisasi belanja aparatur sama atau lebih rendah dari realisasi belanja dalam satu tahun periode dan mampu mencapai target *output* yang telah ditentukan.

Data laporan belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013 menunjukkan tingkat efektivitas belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013. Tingkat efektivitas belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memiliki kriteria yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang pula mengalami penurunan. Tahun 2011 target dan realisasi anggaran belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang sebesar Rp. 23.078.425.621 dan Rp. 16.443.122.314 (71,25%), tahun 2012 sebesar Rp. 27.697.750.413 dan Rp. 16.611.332.822 (59,97%), dan tahun 2013 sebesar Rp. 28.690.341.270 dan Rp. 24.555.235.182 (85,59%). Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti yaitu sejauhmana belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013 telah mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi belanja aparatur tahun 2011-2013 pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas, Efisiensi dan Belanja

Efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu efektif apabila itu mencapai tujuannya. Secara ideal taraf efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti. Efektivitas diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2006) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan pencapaian tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *ouput* yang mengacu pada hasil dari suatu organisasi, program atau suatu kegiatan yang menyatakan sejauh mana suatu tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan targetnya. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *ouput* yang mengacu pada hasil dari suatu organisasi, program atau suatu kegiatan yang menyatakan sejauh mana suatu tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan targetnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Mahsun (2013) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *ouput* yang mengacu pada hasil dari suatu organisasi, program atau suatu kegiatan yang menyatakan sejauh mana suatu tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan targetnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 paragraf 7, Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Lesminingsih dalam Halim (2001:99) Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Halim (2002:68) mengemukakan bahwa belanja

daerah merupakan perunanan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Bastian (2006) menjelaskan bahwa biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat diartikan pengakuan biaya-biaya nonkas, baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan, maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri.

Bastian dan Soepriyanto (2002) mengemukakan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus kas keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, belanja daerah terdiri atas belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Halim (2004:14) menjelaskan bahwa belanja daerah dibagi menjadi 4, yakni :

belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Anggaran atau belanja aparatur digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran aparatur adalah belanja rutin. Dikatakan belanja rutin karena sifatnya berulang-ulang dan ada setiap tahunnya (Mardiasmo, 2002:66). Halim (2004) menjelaskan bahwa belanja aparatur daerah adalah bagian belanja berupa belanja administrasi umum, belanja operasi dan meliharaan, serta belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang sejarah Dinas PPKAD Kabupaten Kupang merupakan salah satu bentuk data kualitatif yang akan dipakai oleh peneliti. Sedangkan data kuantitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Kupang tahun 2011-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer adalah data yang diperoleh langsung dari bagian keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Kupang dan data sekunder yaitu laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan

observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau pustaka. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif kuantitatif, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas PPKAD Kabupaten Kupang merupakan Satuan Kerja yang merangkap 2 fungsi yaitu sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang didasarkan pada data anggaran dan realisasi yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Kupang periode 2011-2013.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Aparatur}}{\text{Target Anggaran Belanja Aparatur}} \times 100\%$$

Hasil analisa menunjukkan anggaran dan realisasi belanja aparatur selama Dinas PPKAD Kabupaten Kupang periode

anggaran tahun 2011-2013, tingkat efektivitas belanja aparatur berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami penurunan, kadang mengalami peningkatan. Tahun 2011 tingkat efektivitas 71,25% dengan kriteria kurang efektif dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 11,28% menjadi 59,97% dengan kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 menurun karena keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama dan belum adanya kebijakan, petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas tentang beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 25,62% menjadi 85,59% dengan kriteria cukup efektif, hal ini terjadi karena tidak adanya keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama, sehingga tidak adanya keterlambatan dalam pengadaan barang untuk keperluan kantor pada triwulan pertama.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100 \%$$

Tingkat efisiensi anggaran belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 91,67%, dan berada dalam kategori efisien, mengalami peningkatan sebesar 1,66% menjadi 93,33% pada tahun 2012, pada tahun 2012 ini juga masih ada dalam kategori efisien karena realisasi belanja aparatur tidak melebihi realisasi

belanja. Tahun 2013 tingkat efisiensi 89,92% atau turun sebesar 3,41%, dan masih dikatakan efisien. Penurunan ini disebabkan oleh belum adanya petunjuk, arahan, dan kebijakan dari Kepala Dinas mengenai beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang di katakan efisien karena masih berada dalam kriteria kurang dari 100%.

Pengelolaan anggaran belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi selama tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas dari anggaran belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang masih dalam kriteria kurang efektif. Ini disebabkan oleh realisasi anggaran masih jauh dari target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas terendah adalah pada tahun 2012 dimana tingkat efektivitasnya hanya 59,97% dan dinilai tidak efektif. Penurunan ini terjadi karena realisasi anggaran masih jauh dari target yang diharapkan. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 menurun karena keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama dan belum adanya kebijakan, petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas tentang beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan. Tahun 2013 tingkat efektivitas belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memenuhi kriteria cukup efektif. Dinas PPKAD

Kabupaten Kupang mengatakan bahwa anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target disebabkan oleh adanya beberapa pengadaan barang, serta alat-alat komunikasi untuk kebutuhan kantor yang dianggarkan tapi tidak

Tingkat efisiensi belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang sudah sangat baik, dimana pada tahun 2011 sampai tahun 2013 anggaran belanja aparatur memiliki kriteria efisien. Tahun 2013 tingkat efisiensi mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh belum adanya petunjuk, arahan, dan kebijakan dari Kepala Dinas mengenai beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan. Tingkat efisiensi berpatokan dalam hal biaya, dimana efisiensi hanya akan ditentukan input yang seminal mungkin untuk menghasikan output yang maksimal. Laporan Realisasi Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Kupang, dimana ada beberapa kegiatan rutin pengadaan belanja aparatur yang sudah dianggarkan dan direalisasikan, diantaranya belanja barang habis pakai, belanja bahan material, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker, belanja sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pengadaan

perlengkapan kantor, belanja pengadaan computer, belanja pengadaan mebeulair.

Sesuai dengan pengertian efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal, maka Dinas PPKAD Kabupaten Kupang telah berhasil memenuhi tingkat efisiensi belanja aparatur melalui program kegiatan pengadaan belanja yang telah dijalankan. Dinas PPKAD Kabupaten Kupang telah berhasil menggunakan dana yang kecil untuk menjalankan program kegiatan pengadaan belanja diatas dan bisa mencapai hasil yang maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas belanja aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Kupang memiliki kriteria yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang pula mengalami penurunan. Tahun 2011 tingkat efektivitas 71,25% dengan kriteria kurang efektif dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 11,28% menjadi 59,97% dengan kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 menurun karena keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama dan belum adanya kebijakan, petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas tentang beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 25,62% menjadi 85,59% dengan kriteria cukup efektif, hal ini terjadi karena tidak adanya

keterlambatan sidang penetapan anggaran triwulan pertama, sehingga tidak adanya keterlambatan dalam pengadaan barang untuk keperluan kantor pada triwulan pertama. Secara Keseluruhan dari tahun 2011-2013 tingkat efektivitas belanja aparatur pada Dinas PPKAD dikatakan kurang efektif.

Belanja aparatur 2011-2013 pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Penggunaan dana ini sudah memenuhi syarat yang efisien yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 91,67%, dan berada dalam kategori efisien, mengalami peningkatan sebesar 1,66% menjadi 93,33% pada tahun 2012, pada tahun 2012 ini juga masih ada dalam kategori efisien karena realisasi belanja aparatur tidak melebihi realisasi belanja. Tahun 2013 tingkat efisiensi 89,92% atau turun sebesar 3,41%, dan masih dikatakan efisien. Penurunan ini disebabkan oleh belum adanya petunjuk, arahan, dan kebijakan dari Kepala Dinas mengenai beberapa pengadaan barang serta alat komunikasi yang sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi belanja aparatur pada Dinas PPKAD Kabupaten Kupang di katakan efisien karena masih berada dalam kriteria kurang dari 100%.

Hasil penelitian ini juga memberikan beberapa saran perbaikan yaitu Dinas PPKAD Kabupaten Kupang lebih mengoptimalkan realisasi anggaran

belanja aparatur yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan, juga meningkatkan efektivitas belanja aparatur yang ada, dengan cara mencapai target yang ditetapkan dengan menggunakan seminimal mungkin alokasi dana yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Bastian, Indra dan Supriyanto. 2002. *Manajemen Sumber daya Manusia*. PT. Remaja Rosda Kanya. Bandung
- Fahrianti, Riswan dan Carolina, Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 13, No. 1*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik.: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mahmudi. 2006. *Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan keempat. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. Andi. Yogyakarta
- Munir, Dasril. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 paragraf 7 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
- Puranto, Hendra dan Anggarini, Yunita. 2010. *Anggaran berbasis Kinerja*. Edisi 1. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Sumenge, Sharon Ariel. 2013. *Pelaksanaan Anggaran Belanja*

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal Emba Vol. 1, No. 3*. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi Manado. Manado
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Universitas Muhammadiyah. Malang
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.